



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDDY FERRAS
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 629556

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.260.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 238 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 1256.64 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 1517.26 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2500 m2/72 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 510.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **139.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED FGB3 1,5 E AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA X1B02N04L0 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. LAINNYA, STIHL / MESIN POTONG RUMPUT FR 3001 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 500.000



4. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 134.430.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 790.663.115

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.324.093.115

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.324.093.115

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.